



## Model Kontekstual Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Provinsi Papua

Andry, Akbar Silo\*, Yundi Hafizriada, Muhammad Musa'ad

Program Doktor Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi Penulis: [assilo708@gmail.com](mailto:assilo708@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Contextual Model, Papua Province, Special Autonomy*

**How to Cite:**

Andry, Silo A., Hafizrianda Y., Musa'ad M. (2022). Model Kontekstual Perencanaan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 10 (1): 27-47

**DOI:**

10.31957/jeb.v10i1.2213

### ABSTRACT

*This study aims to identify and analyze the orientation of meeting the basic socioeconomic needs of the community with the context of Papua, determine and analyze the contextual model of regional development planning in Papua Province, the factors that determine the success of implementing the contextual model of regional development planning in Papua. This study uses a qualitative descriptive method and leads to a case study approach. The data collection method used in-depth interview techniques, content analysis, and Focus Group Discussion (FGD). The results show that development planning must be based on the local context of Papua. What is done by the Government is to build public awareness of the importance of implementing government programs such as in terms of health. Health needs to be monitored from the perspective of the behavior of the Papuan people, namely from cleanliness, fulfillment of nutrition, and fulfillment of basic immunizations. However, the good intentions of this government are considered bad by the Papuan people so that the contextual implementation of this development requires the role of traditional leaders, religious leaders, officials in the village so that the development of the Papua Province is in accordance with a contextual model based on the aspirations of the people in the Papua Province.*

Copyright © 2022 JEB. All rights reserved.

---

**INFO ARTIKEL**

***Kata Kunci:***

*Model Kontekstual,  
Provinsi Papua, Otonomi  
Khusus*

***Cara Mengutip:***

Andry, Silo A.,  
Hafizrianda Y., Musa'ad  
M. (2022) Model  
Kontekstual Perencanaan  
Pembangunan Daerah:  
Studi Kasus Provinsi  
Papua. *Jurnal Ekologi  
Birokrasi*, 10 (1): 27-47

***DOI:***

*10.31957/jeb.v10i1.2213*

---

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis orientasi pemenuhan kebutuhan pokok sosial ekonomi masyarakat dengan kontekstual Papua, menetapkan dan menganalisis model kontekstual perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua, faktor-faktor yang mendeterminasi keberhasilan implementasi model kontekstual perencanaan pembangunan daerah Papua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan mengarah pada pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara secara mendalam, analisis konten, dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan harus berdasarkan kontekstual lokal Provinsi Papua. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program-program pemerintah yang dilaksanakan seperti dalam hal kesehatan. Kesehatan perlu diawasi dari sisi perilaku masyarakat Papua yaitu dari kebersihan, pemenuhan nutrisi, dan pemenuhan imunisasi dasar. Namun maksud baik dari pemerintah ini justru dianggap buruk oleh masyarakat Papua sehingga pelaksanaan kontekstual pembangunan ini membutuhkan peran dari tokoh adat, tokoh agama, aparat yang ada di kampung sehingga pembangunan Provinsi Papua sesuai dengan model kontekstual yang berdasar dari aspirasi masyarakat di Provinsi Papua.*

*Hak Cipta© 2022 JEB. Seluruh Hak Cipta.*

---

**1. Pendahuluan**

Pembangunan suatu bangsa memerlukan suatu aset yang disebut dengan sumber daya baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu bangsa. Akan tetapi apabila dipertanyakan, mana yang lebih penting diantara kedua sumber daya tersebut, maka sumber daya manusia adalah yang penting. Urgensi dari unsur manusia yang sangat menonjol ini adalah wajar karena pola pemikiran manajemen dewasa ini banyak didasarkan atau diorientasikan pada faktor manusia sebagai unsur terpenting dari pada manajemen itu sendiri. Pola ini pula diterjemahkan dengan sukses tidaknya suatu proses manajemen untuk bagian yang terbesar ditentukan oleh faktor manusia yang terlibat dalam proses manajemen yang bersangkutan. Karena dalam prinsip maupun pelaksanaan dari manajemen yang bersangkutan, maka faktor manusia itu perlu dijadikan bahan pertimbangan yang utama disebabkan sumber daya manusia yang menentukan efektivitas keberhasilan pembangunan.

Pembangunan sumber daya manusia ini telah menyerap banyak sumber dana oleh pemerintah. Begitu besar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat khususnya

kepada Provinsi Papua untuk mensejahterakan masyarakat asli Papua yang berada di desa atau kampung-kampung tetapi apa penyebabnya sejak Papua terintegrasi masuk kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai akhir-akhir ini tidak terealisasi pembangunan masyarakat desa kampung itu dengan baik juga dengan kualitas manajemen sumber daya manusia tidak terapkan secara normal di dalam segala bentuk sistem menjadi kendala yang berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia sebagai obyek pembangunan itu sendiri sesuai dengan diharapkan oleh masyarakat desa. Selain pemerintah pusat, peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis. Hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat (Karsiman, 2020).

Adapun tujuan pembangunan itu sendiri adalah mewujudkan suatu masyarakat yang makmur dan sejahtera baik secara individual maupun secara sosial. Hal ini dimaksudkan agar makin tumbuh kesadaran masyarakat, pentingnya pendidikan agar dapat mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif didalam merespon pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan pada faktor yang lebih dominan yang mempengaruhi persoalan dari segi kemanusiaan dan pembangunan, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini, buta huruf, anak putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) dan pengangguran. Hal ini yang membuat sebagian masyarakat kita tidak dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera (Karsiman, 2020).

Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan bahwa Pembangunan Nasional merupakan suatu upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh unsur kehidupan masyarakat, bangsa untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam rangka mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memerlukan percepatan serta peningkatan dan optimalisasi guna efektivitas pelaksanaan Otsus. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan pendekatan secara menyeluruh meliputi pendekatan sosial ekonomi, sosial politik, dan budaya, serta menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, yang salah satunya dilakukan dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), yaitu lembaga yang dibentuk untuk mendukung koordinasi, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Khatarina, 2015).

Pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk melakukan pembangunan dimulai dari desa. Hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa pembangunan yang dikerjakan dalam empat tahun ini orientasinya telah berubah dan pembangunan dimulai dari desa. Pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah di wilayah desa, karena seluruh desa di Indonesia memiliki kekayaan alam masing-masing dan harus dikelola oleh pemerintah agar perekonomian masyarakat suatu desa meningkat. Keberhasilan pembangunan ekonomi tercermin dari beberapa nilai dasar atau nilai inti yang terdiri dari; kecukupan (sustenance), jati diri (self-esteem), dan kebebasan (freedom), harus tercapai pada setiap masyarakat dan

individu sebagai tujuan utama. Kecukupan mengandung arti bahwa masyarakat secara mandiri dapat memenuhi segala kebutuhan pokok hidupnya seperti; sandang, pangan, dan papan. Dimana kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat diperlukan masyarakat dalam menunjang kehidupannya (Bisai et al., 2019).

Kondisi faktual pembangunan manusia tersebut di atas memberikan gambaran bahwa Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki persoalan yang cukup berat dan menjadi tantangan dan satu sisi menjadi tanggungjawab semua pihak dalam hal penanganannya. Sejak menjadi bagian dari NKRI pada tanggal 1 Mei 1963, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Provinsi Papua. Dalam kurun waktu 58 tahun hingga saat ini, pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan dan strategi untuk membangun Provinsi Papua, termasuk pemberian Otonomi Khusus (Otsus) yang seluas-luasnya namun belum mampu mensejajarkan Papua dengan provinsi atau daerah lainnya di Indonesia (Bisai et al., 2019).

Pembangunan di Papua merupakan sebuah manifestasi pola pembangunan dimana tanah “Papua” hanya menjadi tempat dilaksanakannya pembangunan, sehingga tidak merefleksikan pembangunan yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Akibatnya, masyarakat Papua tidak dapat dan tidak mampu merasakan dan menikmati pembangunan yang dilaksanakan di tanah mereka (buku nilai-nilai dasar orang papua).

Analisis penelitian LIPI yang dipimpin Widjojo, dkk, (2008) dalam “Papua Roadmap” menyebutkan bahwa terdapat empat faktor penyebab konflik serta penyebab utama kegagalan pembangunan di Papua. Pertama, persoalan marjinalisasi serta perlakuan diskriminatif terhadap Orang Asli Papua (OAP) akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal (transmigrasi) ke Papua sejak 1970. Kedua, pemerintah gagal melakukan konsolidasi pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ketiga, pelurusan sejarah serta pengakuan terhadap identitas politik orang Papua. Keempat, tanggungjawab moral pemerintah atas kekerasan di masa lampau terhadap warga negara Indonesia di Papua (HAM) (Bisai et al., 2019).

Dalam arsitektur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang tersirat pada berbagai regulasi tentang perencanaan (misalkan, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) selalu dikemukakan perihal asas, tujuan, ruang lingkup dan tahapan perencanaan. Setiap daerah juga diberikan kebebasan berinovasi dalam merencanakan pembangunan daerahnya masing-masing yang selaras dengan penerapan Otonomi Daerah yang asimetris saat ini. Akan tetapi hal itu ternyata harus tetap dilakukan on the right track sebagaimana yang dicitakan oleh pemerintah pusat. Misalkan, mengakomodir sasaran-sasaran strategis nasional dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimum) kementerian dalam penetapan indikator kinerja, melakukan sinkronisasi perencanaan daerah dengan pusat, dan sebagainya.

Fenomena ini akhirnya membuat perencanaan pembangunan daerah di Indonesia sebenarnya masih bersifat top-down. Perencana masih dianggap mengetahui yang terbaik untuk wilayah tertentu (objek perencanaan). Perencana dapat menggunakan expert judgement-nya untuk mengatur konsep, arahan, strategi, dan program pengembangan wilayah (Talitha, 2017). Dalam kenyataannya, semua perencana telah memiliki mindset terkait tujuan ideal perencanaan dan pembangunan, yaitu untuk mendorong pembangunan dan mensejahterakan masyarakat, dimana hal tersebut telah terstandarisasi seperti yang dikatakan oleh McMichael (2012, dalam

Talitha; 2017). Sehingga, munculah formula bahwa hasil perencanaan yang baik sama dengan kinerja wilayah yang diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan infrastruktur besar-besaran, IPM tinggi, kemiskinan yang rendah, dan sebagainya. Dengan kata lain, kegagalan dari suatu perencanaan dinilai standar dengan ukuran pertumbuhan yang rendah, minimnya infrastruktur, IPM yang rendah, kemiskinan yang tinggi, dan seterusnya. Contoh ini dapat dilihat nyata pada konteks perencanaan pembangunan di Provinsi Papua.

Menurut Djojosoekarto et al. (2012), Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2012 menggelontorkan dana Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek) senilai Rp 400 miliar lebih yang diperuntukkan bagi lebih dari 3.000-an kampung di seluruh Provinsi Papua. Setiap kampung memperoleh dana sekitar 100 juta rupiah hingga lebih dari Rp 117 juta. Karena itu, total dana Respek ini mengalami kenaikan yang besar sekali dari Rp 320 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp 457 miliar. Selain itu, kampung juga mendapatkan tambahan dana percepatan pembangunan di kampung dari bupati/walikota setempat. Besaran dana ini bervariasi, mulai dari Rp 200 juta per kampung hingga Rp 1 miliar perkampung. Dana OTSUS yang diserahkan Pusat ke Provinsi Papua sejak 2002 sampai 2010, sudah mencapai Rp 28,8 triliun tetapi ke mana semua uang itu.

Pada 2012, pemerintah akan mengucurkan dana OTSUS sebesar Rp 3,83 triliun untuk Papua dan Rp 1,64 triliun untuk Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 naik 23 % dibanding pada 2011. Selama 2002-2010 Papua dan Papua Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 28,8 triliun. BPK yang hanya mengaudit 66,27% dari dana sebesar Rp 19,1 triliun itu menemukan indikasi penyelewengan sebesar Rp 319 miliar (Kompasiana, 2012). Selain dana OTSUS, pemerintah juga akan mengalokasikan dana tambahan infrastruktur untuk Papua sejumlah Rp 571,4 miliar dan Papua Barat sebanyak Rp 428,6 miliar (Djojosoekarto et al., 2012).

Tetapi semua dana dan kebijakan pemekaran yang dilandasi oleh argumentasi penyejahteraan itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Gunadi (2008) menyatakan bahwa model pembangunan berbasis uang dan pemekaran tersebut justru tidak berhubungan sama sekali dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di seluruh Papua. IPM mengukur capaian umum suatu daerah dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu panjangnya usia (diukur dengan angka harapan hidup), pengetahuan (diukur dengan capaian pendidikan), dan kelayakan hidup (diukur dengan pendapatan yang telah disesuaikan). IPM Papua hingga tahun 2006, lima tahun setelah pemekaran dan OTSUS di berlakukan, tidak mengalami peningkatan yang berarti, bahkan cenderung mengalami stagnasi. Dari 33 provinsi yang ada IPM Papua menempati urutan paling akhir yaitu 33, dan posisi ini terus berlanjut sampai tahun 2010. Sedangkan Papua Barat lebih baik meskipun masih tergolong rendah yaitu di urutan 30, lebih tinggi daripada NTT dan NTB. Kedua provinsi ini memiliki IPM rendah selain karena tidak memiliki sumber daya alam melimpah seperti di Papua dan Papua Barat juga tidak mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah (Djojosoekarto et al., 2012).

Selama ini pendekatan pembangunan untuk Papua yang sangat beragam itu tidak berbeda dengan pendekatan yang digunakan di kawasan barat Indonesia. Kegiatan-kegiatan pembangunan itu dirancang oleh mereka yang tidak mempunyai cukup pemahaman tentang siapa orang Papuu, bagaimana mereka sekarang dan apa yang mereka butuhkan. Sementara itu, para perencana di daerah (provinsi dan kabupaten) tidak cukup kreatif untuk mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di

masyarakat ke dalam rancangan kegiatan mereka. Akibatnya triliun rupiah habis dibelanjakan setiap tahun, tetapi kemampuan masyarakat Papua untuk meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri tetap tidak berubah. Bahkan ada kecenderungan di mana masyarakat di kampung-kampung menjadi semakin tergantung pada bantuan dari luar. Apabila hal ini terus berlangsung terus menerus maka tujuan OTSUS akan semakin jauh harapan, bahkan sebaliknya kesenjangan antara Papua dan wilayah Indonesia lainnya justru akan semakin besar ketika OTSUS berakhir pada 2025 (Djojosoekarto et al., 2012).

Publikasi BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa, pencapaian pembangunan manusia (IPM) di Indonesia pada tingkat provinsi cukup bervariasi. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dan indikator keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua menunjukkan gambaran yang cenderung membaik namun masih ada gap dengan daerah lainnya di Indonesia yang cukup besar. Publikasi BPS pada tahun 2019, IPM pada Provinsi-provinsi di Indonesia Bagian Timur Tahun 2019 adalah di Indonesia sebesar (71,92), Sulawesi Utara sebesar (72,99), Sulawesi Selatan (69,50), Sulawesi Tenggara (71,66), Sulawesi Tengah (71,20), Maluku (68,49), Maluku Utara (65,73), Gorontalo (69,45), Sulawesi Barat (68,70), Papua Barat (64,70) sedangkan di Papua (60,84).

Sedangkan angka IPM di tingkat Provinsi Papua tertinggi tahun 2019 berada pada Kota Jayapura sebesar 80,16. Selanjutnya diikuti Mimika (74,13), Biak Numfor (72,57), dan Kabupaten Jayapura (71,84). Kota Jayapura menjadi satu-satunya dengan capaian IPM sangat tinggi, sementara ketiga lainnya menjadi kabupaten/kota dengan capaian tinggi. Sebagai catatan, Kota Jayapura baru saja berpindah status dari tinggi ke sangat tinggi pada tahun 2019 ini. Pada kelompok capaian sedang, ada delapan, yaitu Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, dan Boven Digoel. Sementara, masih banyak kabupaten di Papua yang berstatus rendah (17 kabupaten), yaitu Mappi (58,30), Jayawijaya (57,79), Paniai (56,58), Dogiyai (55,41), Mamberamo Raya (52,20), Deiyai (50,11), Asmat (50,37), Tolikara (49,68), Yahukimo (49,25), Puncak Jaya (48,33), Lanny Jaya (48,00), Yalimo (48,08), Intan Jaya (47,51), Mamberamo Tengah (47,23), Pegunungan Bintang (45,21), Puncak (42,70), dan Nduga (30,75). Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2019 cukup bervariasi. Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Papua. Sedangkan Kota Jayapura menjadi IPM tertinggi di Provinsi Papua (BPS Indonesia, 2020).

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 268,07 juta jiwa, sedangkan penduduk Provinsi Papua sebanyak 1,26 persen (3,38 juta jiwa) dari keseluruhan penduduk Indonesia. Di tahun yang sama, tercatat sebanyak 926,36 ribu penduduk Provinsi Papua yang hidup dibawah garis kemiskinan, atau 3,68 persen dari keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. Di tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah sebesar 71,92 yang termasuk dalam kategori tinggi. Namun hal ini belum dapat dicapai oleh Provinsi Papua yang memiliki capaian IPM sebesar 60,84 dan termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua pada tahun 2019 mengalami perlambatan hingga 15,72 persen. Hal ini juga yang mempengaruhi perekonomian Indonesia secara umum sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 5,02 persen (BPS, 2020).

Pemerintah Provinsi Papua selama ini selalu dituding oleh berbagai pihak baik itu di daerah sendiri maupun di tingkat pemerintah pusat tidak berhasil menyusun dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerahnya dengan baik. Dimana indikatornya selalu ditunjukan dengan tingkat kemiskinan yang masih paling tinggi di

Indonesia (tahun 2017 sebesar 27,62%), IPM terendah (tahun 2017 sebesar 59,09), ketimpangan pendapatan yang tinggi (tahun 2017 indeks gini sebesar 0,40), dan sebagainya. Bahkan disangkutpautkan dengan banyaknya uang yang mengalir ke wilayah Papua, dimana sudah sekian triliunan rupiah diberikan oleh pemerintah pusat namun belum menunjukkan hasil pembangunan yang nyata. Pada tahun 2017 wilayah Papua mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 56,85 triliun yang terdiri dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kementerian/Lembaga atau Satker sebesar Rp 13,68 triliun dan DIPA Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp 43,17 triliun.

Terkait dengan alokasi anggaran di atas, terdapat sinyalemen dari BPK RI yang menarik untuk diperhatikan, bahwa dana yang mengalir ke Papua, khususnya dana Otsus (Otonomi Khusus) dianggap belum dikelola sesuai peruntukannya dan belum memenuhi azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Temuan BPK menyatakan, dana Otsus ini belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan masyarakat Papua Barat. Hal ini disebabkan karena kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta pola pengawasan yang belum efektif. Dampaknya, pengelolaan dana Otsus menjadi sangat buruk dan banyak penyimpangan. Kemudian, salah satu komisioner KPK juga memberi kritiknya dengan mengatakan bahwa ada ketidaktepatan penggunaan dana Otsus serta APBD Papua dan Papua Barat yang sudah lama dibahas banyak pihak. Persoalan mendasar di Papua menurutnya, bukan salah pemerintah pusat, tapi ada pada jajaran pemerintah di level daerah karena semuanya telah diberikan. Dikatakan bahwa anggaran dan hak istimewa untuk mengatur serta mengurus rumah tangga agar menjadi tuan di negeri sendiri nampaknya belum memberi jawaban kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan masyarakat (Suharyo, 2016).

Dua informasi di atas menjadi menarik untuk diperhatikan karena dikeluarkan oleh lembaga-lembaga audit keuangan negara yang kelihatan menyoroti adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana APBD di seluruh daerah yang ada di wilayah Papua, sehingga belum dapat mensejahterakan masyarakat. Pandangan semacam ini kembali mempertegas bahwa memang sistem perencanaan di Indonesia telah terstandar sedemikian rupa yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan suatu perencanaan. Akibatnya, anggaran yang dikelola untuk melaksanakan perencanaan dikatakan efektif ketika target (standar) yang ditetapkan sebelumnya dapat tercapai. Ada kepuasan dari perencana, pengawas dan evaluator saat target tersebut terpenuhi dalam kadar tertentu sebagaimana yang ditunjukkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terkait dengan evaluasi pelaksanaan perencanaan (*on going*) dan hasil akhir pelaksanaan (*ex-post*) yang dikelompokkan dengan kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Ini artinya, apabila hasil evaluasi tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi maka perencanaan yang diimplementasikan dianggap telah berjalan baik, efektif dan berhasil. Disinilah salah satu kelemahan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang diterapkan oleh pemerintahan di Indonesia selama ini, oleh karena pencapaian target tersebut (dimana target ditetapkan oleh perencana) tampaknya mengenyampingkan apakah menurut perspektif masyarakat kebutuhan tersebut sudah terpenuhi atau belum. Mindset perencana pembangunan daerah jadinya selalu terpaku pada pengetahuan yang hanya berhubungan dengan prinsip-prinsip perencanaan daerah yang bersifat konvensional, normatif dan prosedural sesuai regulasi, seperti membuat RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), dan dokumen-dokumen rencana lainnya. Sehingga kurang memahami dan mengerti, serta tidak

mampu melakukan analisis isu-isu strategis pembangunan yang bersifat perspektif kedaerahan. Padahal pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis isu-isu strategis yang sesuai dengan perspektif lokal itu merupakan elemen mendasar dalam praktek cerdas perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai misal, perencanaan pembangunan dipastikan bertujuan pada peningkatan kesejahteraan. Upaya ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara baik itu bersifat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat miskin. Oleh karena adanya keterbatasan sumber daya, maka sepatutnya para perencana pembangunan dapat mengoptimalkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien melalui penetapan prioritas pemenuhan kebutuhan (need assesment) yang riil bagi masyarakat miskin. Namun, karena peluang yang diberikan oleh perencana pembangunan terhadap masyarakat sangat sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali, untuk berperan serta dalam penetapan prioritas yang dimaksud, akhirnya sering terlihat adanya kegagalan dalam perencanaan, yang kemudian menimbulkan paradoks perencanaan. Terjadi kontradiksi dalam menilai capaian kinerja kesejahteraan antara masyarakat sebagai penerima manfaat, dengan perencana yang melaksanakan program pembangunan. Bagi perencana, selama target kesejahteraan yang ditetapkan sebelumnya telah tercapai, meskipun hal itu kurang dikompromikan dengan masyarakat, maka diasumsikan implementasi dari perencanaan telah berhasil, meskipun secara riil masyarakat belum merasakan manfaatnya.

Menurut Darmawan dan Nazaki, dkk, (2020) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan collaborative governance, dimana pemerintah tidak menjadi satu-satunya pihak yang menguasai jalannya pembangunan baik pada level nasional maupun daerah, keikutsertaan stakeholder's yang lain dalam pembangunan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik. Persepsi ini menyiratkan bahwa perencanaan pembangunan sangat membutuhkan kontribusi yang implementatif dari masyarakat terhadap perumusan isu-isu strategis yang sesuai dengan kebutuhan faktual. Dalam hal ini Raharjo & Harnovinsah (2021) mengatakan perencanaan merupakan jembatan antara proses asesmen dan aktifitas yang berpusat pada perubahan. Perubahan yang dimaksud disini bukan semata hanya pada perubahan ekonomi saja yang lebih mengedepankan pertumbuhan, namun yang lebih komprehensif menyangkut perubahan sosial.

Kegagalan perencanaan pembangunan yang berorientasi terhadap pertumbuhan telah memberi pengalaman yang sangat berharga bagi negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia kala itu. Pertumbuhan yang tidak memperhatikan perubahan sosial menyebabkan ketimpangan sosial yang sangat tinggi antar golongan masyarakat yang akhirnya menjadi bahaya laten bagi perekonomian itu sendiri. Puncaknya ketika terjadi krisis ekonomi, hal itu menjadi blunder bagi ketimpangan sosial yang mencuat menjadi krisis multidimensi. Oleh sebab itu, economy growth-oriented planning saat ini telah mengalami pergeseran diganti dengan sosial change-oriented planning yang menjadi landasan dalam perencanaan sosial. Peranan perencanaan sosial di definisikan sebagai perencanaan untuk melakukan perubahan struktur masyarakat. Perencanaan sosial selalu dihubungkan dengan pencapaian keadilan sosial dalam hubungannya dengan masalah sosial, kebijakan sosial, dan perubahan struktur sosial (Emasari, dkk, 2009). Akan tetapi, dalam pengembangannya, orientasi perencanaan sosial ternyata masih tetapi output oriented, sehingga pencapaian target yang selalu diindikasikan dengan rasio capaian kinerja masih menjadi ultimate goal, dan kurang memperhatikan kondisi kontekstual

kedaerahan karena standar nasional tetap digunakan sebagai patokan dalam mencapai perubahan sosial. Model Contextual Teaching and Learning (CTL) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Trianto, 2012). Tahap inkuiri model kontekstual (CTL) memerlukan prosedur ilmiah untuk menemukan konsep dari hasil praktikum (Fayakun & Joko, 2015).

Tujuh langkah strategis pembangunan di Papua, yaitu pertama, otonomi khusus (OTSUS) Papua sesuai dengan UU 21/2001 masih kontekstual untuk pembangunan di Papua. Kedua, OTSUS membuka ruang bagi orang asli Papua berperan di dalam pemerintahan daerah. Ketiga, OTSUS menjadi panduan dalam melakukan pembangunan SDM, ekonomi dan infrastruktur Papua. Keempat, perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan kultural. Kelima, komitmen memberdayakan orang asli Papua di kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan BUMN. Keenam, penetapan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON XX pada Oktober 2021. Ketujuh, strategi dan kebijakan untuk Papua didasarkan sejumlah kondisi global (Raidyarto, 2018).

Terkait dengan berbagai konsep berpikir di atas, maka penulis merasa terganggu untuk mengkritisi sistem perencanaan pembangunan daerah yang diberlakukan selama ini di Papua melalui sebuah ide untuk mengembangkan suatu model kontekstual yang dapat diterapkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua. Pembahasan tersebut sangat penting karena sebagian besar literatur terkait perencanaan pembangunan di Papua hanya memasukkan faktor-faktor politik dan ekonomi serta keamanan dan kemudian mengesampingkan faktor struktur demografi didalamnya. Diharapkan dengan adanya pembahasan perencanaan pembangunan dengan mengambil sisi demografi sebagai salah satu variabel utamanya dapat menambah bahan rujukan bagi para pemangku kepentingan sehingga kebijakan dan program yang direncanakan benar-benar komprehensif. Pulau Papua sebagai fokus pembahasan berkenaan dengan kompleksitasnya di berbagai sektor khususnya dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengarah pada paradigma positivis yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini hanya mengungkap sisi kebenaran objek yang diteliti (Morissan, 2019, hal. 57). Metode penelitian deskriptif kualitatif sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu (Mukhtar, 2013, hal. 10). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai subyek penelitian dan perilaku subyek penelitian pada suatu periode tertentu (Mukhtar, 2013, hal. 11). Penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Papua yang terdiri atas 29 kabupaten/kota, dimana secara garis besarnya berdasarkan topografi dapat dipetakan menjadi 2 (dua) bagian yakni wilayah pegunungan dan wilayah pesisir. Selain berbeda secara topografi, karakteristik masyarakat yang bermukim diantara kedua wilayah tersebut memiliki perbedaan yang mencolok satu sama lainnya.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Peneliti mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berupa pendapat secara individu, hasil pengamatan terhadap benda, kejadian, peristiwa atau kegiatan, dan hasil pengujian suatu data. Sumber data primer diperoleh dan

dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara dengan informan dan didukung dengan dokumentasi. Berdasarkan kriteria ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan memasukkan metode prosedur snowball sampling untuk mencari informan-informan yang berkaitan dengan penelitian ini (Bugin, 2011, hal. 108; Creswell, 2007, hal. 412).

Teknik purposive sampling digunakan untuk memfasilitasi tercapainya informan yang memiliki kriteria tertentu. Moustakas (1994, hal. 107) menjelaskan bahwa esensi informan dalam penelitian fenomenologi mencakup: 1) informan harus mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian; 2) informan mampu memberikan informasi dan menjelaskan fenomena yang dialaminya sehingga peneliti akan memperoleh data yang alami dan reflektif menggambarkan keadaan sesungguhnya; 3) informan terlibat dalam penelitian untuk jangka waktu yang lama; 4) informan bersedia diwawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung; kelima, informan setuju untuk mempublikasikan hasil penelitian. Penggunaan metode sampling ini diharapkan dapat memberikan peluang maksimum bagi peneliti untuk melakukan analisis yang dapat diperbandingkan terhadap masing-masing informan, yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda.

Untuk mendapatkan data-data informan, peneliti menghubungi Sekretaris Bappeda Provinsi Papua, Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Papua, Sekretaris Bappeda Kabupaten Paniai, Asmat dan Keerom, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Kabupaten Asmat dan Kepala Sub Bagian Program Kabupaten Biak.

Selain menggunakan wawancara secara mendalam (depth interview), peneliti juga melakukan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi umum yang berkaitan dengan informan serta mencatat dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Proses wawancara secara mendalam juga memerlukan dokumentasi dengan menggunakan voice recorder pada handphone atau alat perekam khusus yang akan menjadi bahan manuskrip wawancara. Selanjutnya, peneliti secara tidak disengaja melakukan observasi karena pada saat wawancara, informan mengajak peneliti untuk menjelaskan model kontekstual perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua. Dengan menggunakan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, peneliti yakin akan dapat memenuhi kebutuhan data secara tepat sehingga dapat menjamin validitas hasil penelitian.

Selain depth interview, penelitian ini juga menggunakan Focus Group Discussion (FGD). FGD ini sebagai teknik untuk pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui metode FGD pada umumnya berhubungan dengan berbagai peristiwa atau isu-isu sosial di masyarakat yang dapat memunculkan stigma buruk bagi individu atau kelompok tertentu. Informasi yang diperlukan dari individu atau kelompok tersebut tidak memungkinkan diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya. Namun, metode FGD kurang tepat untuk memperoleh topik/data yang bersifat sangat personal seperti isu-isu sensitif kehidupan pribadi, masalah keuangan, dan agama yang bersifat personal (Kitzinger, 1996; Lehoux et al., 2006).

Pada tahap analisis data, peneliti akan menganalisis temuan-temuan berupa realitas-realitas sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial yang akan diidentifikasi selama peneliti menganalisis data, terutama data hasil wawancara. Penelitian ini menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yaitu flow model analysis. Menurut Miles & Huberman (1990) terdapat aktivitas yang dilakukan untuk menganalisis data, yaitu: reduksi data, display data lalu menarik kesimpulan.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Implementasi Model Kontekstual Perencanaan Pembangunan Daerah Papua

Model kontekstual perencanaan pembangunan daerah Papua dapat disimpulkan melalui adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan rencana dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat Papua bekerja dan belajar secara gotong royong dan kelompok serta menyelesaikan permasalahan sesuai dengan konteks yang ada di Papua. Pada akhirnya, model ini bertujuan membangun kesadaran masyarakat Papua bahwa pembangunan dan kemajuan di Papua tidak akan berhasil tanpa keikutsertaan dari masyarakat Papua sendiri.

Kontekstual diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan konteks. Adapun yang dimaksud dengan konteks adalah kondisi di mana suatu keadaan terjadi. Makna kontekstual dapat muncul karena situasi, tempat, lingkungan atau waktu. Pengertian konseptual lebih berhubungan dengan hal-hal yang konsep, dimana konsep sebagai ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Sehingga makna konseptual diartikan sebagai sebuah makna atas suatu kata yang tidak tergantung dari konteks. Ini berarti bila diperhatikan dari cakupannya, makna konseptual diberlakukan secara umum, sedangkan kontekstual lebih bersifat khusus. Sehingga pendekatan kontekstual dalam pengembangan sebuah model dapat diartikan sebagai cara untuk mengabstraksikan dari sistem sebenarnya yang sesuai dengan kondisi di mana suatu keadaan terjadi (bersifat khusus). Dalam arti yang lain dapat dikatakan bahwa model kontekstual merupakan abstraksi dari realitas dengan memusatkan perhatian pada beberapa sifat khusus dari kehidupan sebenarnya secara kontekstual.

Model kontekstual merupakan suatu perpaduan antara realitas (kenyataan) dan interpretatif (dapat diinterpretasikan) dalam konteks tertentu. Sebagai suatu model yang baik (good model) maka model kontekstual merupakan model yang memiliki spesifikasi sangat rinci (holistik) sehingga dapat menangkap realitas yang ada sesuai keadaan yang terjadi, dan disaat yang sama juga memiliki spesifikasi yang cukup sederhana sehingga interpretatif (dapat diinterpretasikan) untuk dianalisis dan diambil kesimpulan.

Dalam sebuah perencanaan dapat dibedakan tiga sistem analisis, yaitu: (1) Analisis Linier, ialah analisis yang bersifat lurus berdasarkan hukum sebab-akibat, sistem ini sangat sesuai untuk mempelajari hubungan-hubungan yang bersifat variabel, bagi permasalahan yang bersifat aritmatik seperti untuk kuantitas dan kualitas; (2) Analisis Nonlinier, adalah analisis yang bersifat membandingkan dan membedakan mengenai isi, waktu, jenis, ukuran berat, harga dan lain-lain. Analisis ini sangat sesuai mempelajari model-model alternatif, substitusi dan lain-lain. Analisis ini juga untuk memperkirakan peluang dan untuk penentuan tentang batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Dengan analisis ini dapat diambil kesimpulan dengan cara membandingkan satu dengan yang lain; (3) Analisis Thematic atau disebut juga analisis dinamik, analisis ini tidak langsung ditujukan kepada objek atau yang bersifat teknis.

Analisis ini selain digunakan terhadap yang sifatnya internal juga dapat digunakan terhadap yang sifatnya eksternal. Sedangkan informasi yang dianalisis dapat berupa data yang ada hubungan maupun yang tidak ada hubungan dengan tujuan. Disini dituntut kemampuan dan wawasan yang luas dari perencana, dengan analisis ini permasalahan yang dihadapi dapat dihubungkan dengan perubahan zaman, keyakinan, agama, sejarah, ketahanan bangsa dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa ketiga sistem analisis ini tidak merupakan sistem yang terpisah yang bersifat sendiri-sendiri tetapi

dapat digunakan bersama-sama untuk satu objek atau masalah atau dapat digunakan dengan mengutamakan yang satu dari yang lain (Jauch, 1999).

Untuk mencapai tujuan pokok dari ketiga sistem analisis di atas, kita memerlukan sebuah model perencanaan yang bisa menggambarkan hubungan antara berbagai variabel yang menjelaskan kejadian masa lampau dan meramalkan kejadian masa depan berdasarkan serangkaian asumsi yang disederhanakan. Berdasarkan perspektif ekonomi, Fox, Sengupata dan Thorbecke (dalam Daryanto, Hafizrianda, 2018) membagi model perencanaan dalam tiga kategori, yaitu (1) model konsistensi, (2) model optimasi, dan (3) model simulasi. Model konsistensi mengklasifikasikan variabel-variabel ke dalam tipe endogen dan eksogen, dan pada dasarnya merupakan model ekonometrik persamaan simultan. Hubungan antarsektor dan konsistensinya dapat pula dilihat bila model ini dikombinasikan dengan informasi input-output (I-O). Sesuai dengan namanya, model optimasi berkenaan dengan mengoptimalkan beberapa tujuan atau fungsi preferensi dalam batas kendala tertentu, misalnya terbatasnya sumber daya, neraca pembayaran dan sebagainya. Kategori ketiga adalah model simulasi. Model ini terutama mengadakan percobaan dengan analogi sistem ekonomi dan kemudian menyimpulkan beberapa sistem ekonomi berdasarkan tingkah laku analogi tersebut.

Sementara dalam perspektif sosial Hudson (1979) mengemukakan lima model perencanaan antara lain *Synoptic, Incremental, Transactive, Advocacy dan Radical* yang kemudian dibuat akronim dengan sebutan SITAR. Pertama, Model Perencanaan Sinoptik, yaitu lebih bersifat komprehensif rasional. Perencanaan sinoptik sendiri mempunyai empat elemen yaitu penetapan tujuan, identifikasi alternatif kebijakan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan. Proses ini lebih cenderung memakan waktu yang relative lama karena melihat masalah dari berbagai sudut pandang system dan secara menyeluruh. Selain itu proses ini menggunakan model konseptual matematis dan analisis kuantitatif. Kedua, Model Perencanaan Inkremental yaitu perencanaan yang lebih mementingkan aspek dialog, menerima kritikan dan saran demi kepentingan bersama. Selain itu dalam melakukan perencanaan sangat mempertimbangkan pengalaman, aturan praktis, berbagai teknis dan koordinasi.

Perencanaan inkremental lebih bersifat desentralisasi dan tidak cocok untuk jangka panjang. Jadi perencanaan ini menekankan perencanaan dalam jangka pendek saja. Dalam merencanakan suatu perencanaan sangat memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Ketiga, Model Perencanaan Transaktif yaitu berfokus pada pengalaman kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui isu- isu/permasalahan yang terjadi. Dengan demikian keputusan atau kebijakan perencanaan dapat dilakukan. Kemudian dengan cara tatap muka secara langsung dengan individu atau masyarakat sehingga dapat digali segala permasalahan atau keinginan yang ingin dicapai. Perencanaan transaktif lebih bersifat desentralisasi yaitu terjadinya aksi sosial untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Perencanaan transaktif dievaluasi dari segi nilai, perilaku, kerjasama, semangat, dan kemurahan hati. Keempat, Model Perencanaan Advokasi yaitu biasanya diterapkan untuk membela kepentingan yang lemah dan orang miskin. Oleh karena itu pembuat perencanaan ini biasanya dilakukan oleh non-pemerintah seperti (LSM, pemerhati sosial). Kelima, Model Perencanaan Radikal yaitu hampir sama dengan perencanaan transaktif dimana lebih menekankan kepada kegiatan saling membantu, kemandirian, semangat kerjasama, dan bebas dari manipulas. Perencanaan radikal dalam membuat perencanaan lebih menekankan pada pertimbangan akar permasalahan yang terjadi. Adapun prinsip dari perencanaan radikal yaitu bersifat

spontanitas dan konkrit sehingga lebih cocok untuk diterapkan pada perencanaan jangka pendek atau menengah.

Jika dikaji lebih jauh lagi, akan banyak ditemukan berbagai macam model perencanaan, ada model perencanaan stratejik, model perencanaan pembelajaran, model perencanaan kesehatan, model perencanaan partisipatif, dan sebagainya. Bahkan, khusus dalam pembangunan, terdapat model-model perencanaan pembangunan yang diungkap oleh pakar perencanaan, seperti model perencanaan *top-down*, model perencanaan *bottom-up*, model pembangunan sektoral, model pembangunan wilayah, dan seterusnya. Namun yang pasti, pilihan model-model perencanaan pembangunan sangat tergantung kepada beberapa faktor. Pertama, kemampuan tenaga perencanaan untuk mempergunakan model tersebut (aspek sumber daya manusia). Kedua, tersedianya waktu, data dan berbagai fasilitas penunjang lainnya (aspek infrastruktur). Ketiga, bentuk pendekatan yang akan dipergunakan didalam menyusun perencanaan pembangunan (aspek metode).

Walaupun ketiga faktor di atas seperti ini membatasi suatu daerah didalam memilih model perencanaan pembangunannya, bukan berarti setiap kali menyusun perencanaan pembangunan jangka pendek selalu menggunakan model-model yang sama dan sangat terbatas. Kehidupan sosial budaya dan ekonomi itu berjalan dinamis, akibatnya orientasi pembangunan tidak mungkin terus sama setiap tahun. Untuk itu agar tujuan pembangunan daerah dapat diarahkan sebaik mungkin dan mudah dicapai setiap waktu, sangat diperlukan pula peningkatan pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur, dan metode yang digunakan pada saat menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dengan kata lain, harus ada peningkatan didalam menggunakan suatu model perencanaan, untuk mengimbangi perkembangan jaman yang dinamis namun tetap sesuai dengan suatu keadaan yang terjadi. Oleh sebab itu pendekatan model kontekstual merupakan suatu keniscayaan yang sangat tepat diterapkan dalam perencanaan pembangunan.

Penerapan model kontekstual dalam perencanaan pembangunan dapat dikembangkan melalui best practice pada konteks pembangunan di daerah Papua. Hal ini karena Papua mempunyai keragaman suku dan budaya yang jauh lebih tinggi daripada provinsi lain di Indonesia sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi perencanaan pembangunan. Kartikasari, Marshall dan Beehler (2012) menegaskan kemajemukan sosial budaya masyarakat Papua dapat diamati mendalam pada kemajemukan bahasa, struktur sosial, sistem kepemimpinan, agama, mata pencaharian, sistem penguasaan lahan, orientasi nilai budaya dan etika kerja di kalangan masyarakat Papua.

Hasil dari interview dan FGD maka dapat ditentukan beberapa faktor yang menentukan keberhasilan implementasi model kontekstual perencanaan pembangunan daerah Papua, antara lain:

*Bahasa.* Terdapat sekitar 269 bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat di Papua, yang dapat dikelompokkan menjadi dua golongan besar, yaitu bahasa Austronesia dan nonAustronesia (sering disebut bahasa Papua). Keragaman bahasa di Papua ini telah mendorong penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehingga sebagian besar orang Papua bisa berkomunikasi dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia.

*Struktur Sosial.* Orang Papua dapat dibagi paling sedikit menjadi 4 (empat) kelompok berdasarkan sistem kekerabatannya. Kelompok pertama menggunakan sistem kekerabatan yang mirip dengan suku Iroquois, penduduk asli Amerika (tipe Iroquois). Kelompok kedua menggunakan sistem kekerabatan yang mirip dengan yang

digunakan oleh penduduk asli di Hawai'i (tipe Hawai'i). Kelompok ketiga menggunakan tipe kekerabatan Omaha, sedangkan kelompok keempat meliputi orang-orang yang menggunakan tipe kekerabatan Iroquois-Hawai'i.

*Sistem Penguasaan Tanah.* Ada dua tipe penguasaan dan pemanfaatan tanah yang umum di kalangan masyarakat Papua, yaitu kepemilikan bersama (komunal) dan kepemilikan individu. Pada sistem kepemilikan komunal, tanah yang merupakan sumber pokok mata pencaharian dimiliki secara komunal. Ada dua tipe kepemilikan komunal di Papua ini, yaitu yang berbasis pada marga yang kecil dan yang berbasis pada marga besar (kampung). Baik pemimpin marga maupun pemimpin masyarakat tidak bisa membuat keputusan sendiri, rencana pembangunan masyarakat, pemanfaatan lahan dan kepemilikan harus dibuat bersama-sama.

*Sistem Politik.* Sistem politik juga sangat beragam di Papua, yang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) sistem. Keempat sistem ini adalah: sistem orang besar (orang kuat), sistem kerajaan, sistem ondoafi dan sistem campuran. Pada sistem politik orang besar posisi kepemimpinan berbasis pada prestasi individu. Dalam sistem kerajaan ciri utamanya adalah posisi kepemimpinan dan status politik, diperolehnya berdasarkan keturunan atau warisan. Sistem ondoafi mirip dengan sistem kerajaan, yaitu posisi kepemimpinan diwariskan dengan memanfaatkan birokrasi tradisional. Sistem politik terakhir yang ada di Papua adalah sistem campuran, yaitu kepemimpinan diwariskan atau berdasarkan prestasi. Dengan kata lain, seseorang bisa menjadi pemimpin atas dasar kemampuan pribadinya atau karena keturunan.

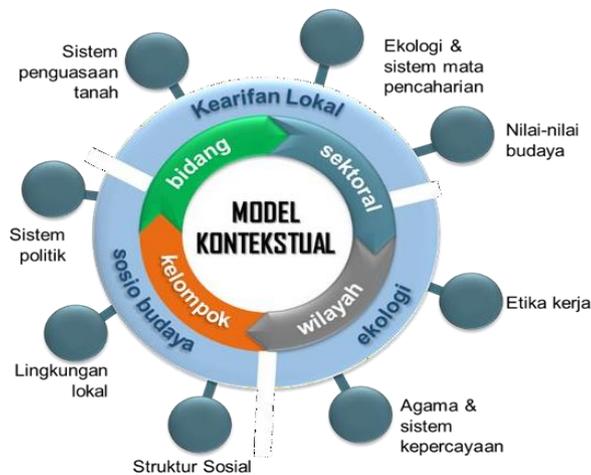
*Agama dan Sistem Kepercayaan.* Agama-agama utama seperti Kristen dan Islam masuk ke Papua pada waktu yang berbeda-beda. Sebelum Agama Islam dan Kristen masuk ke Papua, setiap suku asli telah mempunyai sistem kepercayaan tradisional yang beragam di antara berbagai kelompok, tetapi sebagian besar kelompok mempercayai satu Tuhan yang memegang kekuasaan tertinggi atas penguasa-penguasa lainnya. Masyarakat Papua juga percaya bahwa roh nenek moyang yang telah meninggal itu diberi kuasa oleh Tuhan Pencipta untuk mengendalikan manusia yang masih hidup.

*Ekologi dan Sistem Mata Pencaharian.* Lingkungan hidup di Papua dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori utama, yaitu: daerah rawa, daerah pesisir dataran rendah, daerah perbukitan dan lembah-lembah kecil dan daerah dataran tinggi. Masing-masing zona ini menopang sistem mata pencaharian yang berbeda. Di daerah rawa masyarakat terutama bergantung pada sagu sebagai bahan makanan utama dan ikan. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan pinggiran sungai, usaha perikanan, budidaya sagu dan pertanian merupakan kegiatan ekonomi pokok, sementara berburu merupakan strategi alternatif. Masyarakat di perbukitan dan lembah-lembah kecil utamanya bergantung pada pertanian dan sagu, berburu dan memelihara ternak. Kelompok masyarakat di dataran tinggi, mereka bertani dan memelihara babi sebagai sumber mata pencaharian utamanya.

*Filsafat Hidup.* Nilai-nilai budaya yang diwujudkan dalam norma-norma sosial, etika, aturan dan hukum berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. Namun, perbedaan budaya ini dapat dikelompokkan berdasarkan pandangan budaya tersebut terhadap 5 (lima) konsep dasar, yaitu (1) konsep tentang Makna Hidup, (2) persepsi terhadap kerja, (3) konsep tentang hubungan manusia dengan alam, (4) persepsi tentang waktu, dan (5) persepsi terhadap Sesama Manusia. Lima prinsip ini dapat digunakan untuk memahami sikap hidup orang atau kelompok masyarakat.

*Nilai-nilai budaya* (Local wisdom) masyarakat Papua. Beberapa pakar berpendapat bahwa budaya Papua tidak inovatif ketika berhubungan dengan eksplorasi alam. Hal ini mungkin karena kepercayaan tradisional bahwa alam mempunyai kekuatan spiritual atas kehidupan dan nasib manusia, yang harus disegani dan dihormati. Namun, pandangan ini tidak berlaku secara menyeluruh karena sebagian budaya Papua mempunyai sejarah eksplorasi lingkungan dan ekspedisi di dalam dan di luar Papua. Kecenderungan terhadap eksplorasi mendorong munculnya keahlian pembuatan perahu dan pelayaran di kalangan masyarakat ini. Nilai budaya yang menghargai upaya-upaya perorangan mendorong banyak orang Papua untuk bekerja keras, yang pada gilirannya menguntungkan kelompok secara keseluruhan. Nilai-nilai ini juga membangun kemandirian dan rasa percaya diri pada sebagian orang, serta membangun rasa tanggung jawab pada sebagian orang lainnya.

*Etika kerja.* Etika kerja suatu masyarakat menggambarkan norma sosial dan sikap umum terhadap kerja. Etika kerja masyarakat yang hidup berkelompok di daerah rawa dan mengandalkan pada sagu untuk kelangsungan hidupnya berbeda dengan etika kerja orang Papua yang bertani. Bagi masyarakat yang bertani, etika kerja mereka lebih diarahkan sebagai investasi untuk keuntungan di masa yang akan datang. Selain itu, banyak pula budaya Papua yang sangat kompetitif. Mereka bersaing untuk menjadi anggota kelompok yang sukses dan berkuasa dengan cara menumpuk kekayaan atau menunjukkan kemampuan berdiplomasi, kemampuan berperang, kecakapan berorganisasi, atau kemampuan magis. Karena itu, orang Papua memiliki jiwa kompetisi, yang dihargai di dunia modern dan merupakan modal untuk memasuki ekonomi global. Belajar dari kemajemukan sosial budaya Papua di atas, maka model kontekstual yang dapat dikembangkan untuk memperkaya wawasan model-model perencanaan pembangunan daerah, dibangun berdasarkan prinsip dasar kontekstual, yaitu:



Ketiga prinsip dasar di atas adalah suatu fundamental yang dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam menyusun model perencanaan kontekstual. Prinsip-prinsip dasar ini juga merupakan roh dari perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Dalam bentuk visualisasi, model kontekstual untuk perencanaan pembangunan daerah.

### 3.2. Perencanaan Pembangunan di Papua berbasis Model Kontekstual dan Teori Institusional

Pembangunan Provinsi Papua diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan perkapita, tingkat inflasi, kemahalan konstruksi, tingkat pengangguran, pertumbuhan investasi regional, ekspor-impor Migas dan Non Migas, tingkat kemiskinan, pembangunan manusia dan keuangan. Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 2,32 persen meskipun pada tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan karena terjadi penurunan produksi tambang pada tahun tersebut. Pada sektor pertambangan terdapat lapangan usaha pertambangan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020, namun terjadi penurunan yang signifikan pada sektor transportasi, penyediaan makan dan minum, lapangan usaha di bidang jasa yang disebabkan oleh dikeluarkannya peraturan pemerintah untuk menekan laju penyebaran virus Covid-19.

Indikator kedua yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Provinsi Papua masih terkendali dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018-2020. Provinsi Papua masih dapat menekan tingkat kemahalan harga. Pada tahun 2018, inflasi di Provinsi Papua dominan disebabkan oleh naiknya harga komoditas pada kelompok bahan makanan. Pada tahun 2019, kontributor utama inflasi tercatat berasal dari kenaikan harga komoditas pada kelompok bahan makanan; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; serta kelompok makanan jadi, minuman kemasan, rokok, tembakau (BPS Provinsi Papua, 2020). Sementara itu, pada tahun 2020, inflasi umum utamanya terbentuk dari kenaikan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Indikator ketiga yaitu tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Tingkat tenaga kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun sebanyak 4,28% semenjak pandemi Covid-19. Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua meningkat. Hal ini menandakan bahwa dampak pandemic Covid-19 membatasi aktivitas tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang menganggur.

Indikator keempat yaitu pertumbuhan dan produktivitas investasi regional. Peneliti melihat bahwa pada sektor pariwisata menurun semenjak pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia. Adanya kerjasama Kementerian Investasi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan kapasitas SDM, pengembangan destinasi dan infrastruktur di bidang parekraf. Kerja sama juga mencakup pengembangan industri dan investasi di bidang parekraf, pengembangan pemasaran peluang investasi parekraf, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam pengembangan parekraf, koordinasi dan harmonisasi dalam penyusunan kebijakan di bidang parekraf.

Indikator kelima, yaitu Ekspor-Import Migas dan Non-Migas. Provinsi Papua mengalami surplus perdagangan pada tahun 2020 dari sektor Migas maupun Non-Migas. Pada sektor migas, Provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 0,45% dari tahun 2019, meskipun secara nasional angka impor mengalami penurunan. Hal ini mengidentifikasi bahwa Provinsi Papua menyumbang angka dalam ekspor migas. Sedangkan angka impor migas pada Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar 43,81% dibandingkan dengan tahun 2019. Sedangkan, pada ekspor Non- Migas, provinsi Papua rata-rata turun -0,66% perbulan dari tahun 2018. Trend yang menurun ini mengindikasikan bahwa Provinsi Papua ekspor sangat tergantung dengan produksi bahan komoditi. Sedangkan angka impor Non-Migas juga mengalami penurunan sebesar 38,77 persen.

Indikator keenam, yaitu tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Secara umum, pada periode Maret 2010 – September 2020 tingkat kemiskinan mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 26,42 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,37 persen poin terhadap Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen. Salah satu faktor yang berpengaruh pada meningkatnya angka kemiskinan Maret 2020 adalah adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.

Indikator ketujuh, yaitu pembangunan manusia. Selama periode 2019-2020, terdapat lima belas kabupaten di Provinsi Papua mengalami kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), satu kabupaten tetap, sementara 13 kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan. Kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat yaitu: Kabupaten Nduga (2,60 persen), Pucnak (0,80 persen), dan Mamberamo Tengah (0,72 persen). Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan. Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan paling dalam yaitu Deiyai (-1,30 persen), Dogiyai (-1,03 persen) dan Mamberamo Raya (-0,80 persen).

Indikator kedelapan, yaitu keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah Provinsi Papua terindikasi sangat rendah sehingga masuk dalam kategori pola hubungan instruktif. Kondisi ini terjadi karena sepanjang tahun 2015-2019 rata-rata tingkat Kemandirian Fiskal Provinsi Papua hanya 9,90% per tahun. Rendahnya kemampuan keuangan daerah menyebabkan ketergantungan fiskal di Provinsi Papua sangat tinggi. Sebagaimana yang divisualisasikan selama tahun 2015-2019 rata-rata tingkat Ketergantungan Fiskal Provinsi Papua mencapai 91,01% per tahun, yang masuk dalam kategori ketergantungan sangat tinggi, dan cenderung tidak banyak mengalami perubahan.

Kualitas pembangunan dapat dinilai dari sudut pandang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat Provinsi Papua itu sendiri. Masyarakat juga memiliki sudut pandang penilaian terhadap pembangunan yang telah dilakukan. Pembangunan daerah merupakan suatu alat ukur yang tidak hanya untuk mengetahui kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan seperti kebutuhan dalam bidang sosial, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi itu sendiri. Ukuran-ukuran tersebut yang dianggap sebagai pembangunan secara makro dan bersifat kuantitatif yang artinya diukur dengan keberadaan suatu objek yang nyata. Namun penelitian ini lebih mengupas lebih dalam bahwa pembangunan harus didasari oleh ukuran-ukuran yang bersifat kualitatif. Ukuran kualitatif merupakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pembangunan apabila kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat dibangun dan direalisasikan dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat Provinsi Papua, sehingga pembangunan dilakukan secara merata dan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi di Provinsi Papua. Penelitian ini tidak hanya menggunakan data-data dari pemerintah yang menjelaskan keberhasilan dalam menurunkan kemiskinan ataupun meningkatkan perekonomian, karena masyarakat bisa menilai apakah pembangunan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat itu

sendiri atau tidak, sehingga diperlukan suatu konsep kebutuhan kontekstual masyarakat Papua.

Berdasarkan analisis tersebut, perencanaan pembangunan Provinsi Papua berdasar Model Kontekstual sejalan dengan teori institusional. DiMaggio dan Powell (dalam Donaldson, & Preston, 1995), melihat ada tiga bentuk institusional yang bersifat isomorphis, yaitu pertama, Coersif isomorphis yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mengambil beberapa bentuk dalam melakukan adopsi terhadap tekanan-tekanan politik ekonomi internasional. Kedua, mimetik isomorphis, yaitu imitasi sebuah organisasi oleh organisasi yang lain. Ketiga, normatif isomorphis, karena adanya tuntutan profesional dengan menggunakan bantuan dari para akademisi maupun jasa dari para konsultan.

Dalam analisis dengan menggunakan isomorfisma coersif dan normatif berdasarkan pada hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemerintah pusat membentuk suatu fokus pembangunan di Provinsi Papua dalam tiga tujuan utama diantaranya menciptakan suatu keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan, mengurangi kesenjangan wilayah, menurunkan harga di masing-masing wilayah. Hal ini merupakan tantangan Pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di Provinsi Papua. Dalam hal ini pemerintah mempunyai beberapa dasar hukum dalam mempercepat pembangunan Papua antara lain: Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan tindaklanjutnya dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

#### **4. Kesimpulan**

Indonesia dihadapkan pada kebudayaan masyarakatnya yang sangat beranekaragam, dan Provinsi Papua memiliki pola-pola yang jauh berbeda dari pola-pola kebudayaan di Indonesia bagian barat. Akibat dari keanekaragaman tersebut generalisasi tidak dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakat Papua, sehingga tidak mungkin dibuat suatu usaha pembangunan terpadu atas dasar satu model tunggal. Pola-pola kebudayaannya yang sangat berbeda dengan bagian lain di Indonesia, mudah sekali menimbulkan salah penilaian terhadap potensi-potensi kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat itu. Dengan kata lain, dengan kata lain, ada kecenderungan etnosentris yang menganggap model yang dihasilkan atas dasar asumsi-sasumsi kebudayaan sendiri lebih baik, karena itu budaya harus dirubah.

Kemudian, hal yang digunakan untuk mencari suatu model pengembangan baik secara konseptual maupun operasional yang memperhitungkan keanekaragaman kebudayaan itu yang sekaligus disesuaikan dengan watak dari kebudayaan masyarakat Provinsi Papua itu sendiri. Persoalan pokok yang harus diatasi kalau pendekatan yang telah diutarakan dapat diterima adalah bahwa ke satu arah perhatian yang terlalu memperhitungkan keanekaragaman menghasilkan pendekatan yang sangat kompleks dan sulit dioperasionalkan, sedangkan ke arah lain tanpa disadari unsur-unsur etnosentris masuk ke dalam pelaksanaan pendekatan itu. Oleh karena itu, dalam mengadakan perubahan kebudayaan suatu masyarakat kita harus berpangkal-tolak dari orientasi kebudayaan yang bersangkutan, bukan kebudayaan dari luar. Pemahaman dari dalam berdasarkan empati memungkinkan untuk menemukan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan yang bersangkutan yang dapat diubah tanpa mengakibatkan disrupsi pada strukturnya, dan mengidentifikasi potensi-potensi kebudayaan yang dapat dijadikan pangkal tolak pembangunan masyarakatnya secara efektif dan lestari.

Di satu sisi kurang memperhitungkan sifat keunikan dan keanekaragaman masyarakat Papua, sedangkan sisi lainnya menggunakan satu model pembangunan yang terlalu kompleks atau mengandung unsur etnosentris dapat dicegah bila berangkat dari titik tolak bahwa kebudayaan asli dapat dan harus digunakan sebagai media atau alat bagi pembangunan. Satu risiko yang lain, secara implisit, pembangunan ekonomis lebih ditekankan. Satu kebijaksanaan pembangunan yang demikian secara keseluruhan memerlukan pengetahuan yang mendalam dari masyarakat yang bersangkutan. Dalam penelitian ini alat ukur permasalahan dapat dilihat pada sumber daya alam, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.

Pendekatan ekonomis dengan mengorbankan pendekatan sosial-budaya dan yang ini telah mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat, bahkan kesenjangan antara perkembangan dari pusat perkotaan dengan perkembangan di daerah pedesaan terpencil. Meskipun terjadi pertumbuhan secara kuantitas, namun kualitas pendidikan dinilai cukup rendah. Hampir semua jenis jenjang pendidikan dihadapi dengan kekurangan tenaga pendidik yang belum berkualitas sedangkan mereka adalah pemandu dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, segi kualitas dan kualifikasi perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk kesejahteraan tenaga pendidik sehingga lebih menarik untuk mereka, khususnya tenaga pendidik yang bekerja di daerah terpencil.

Di samping pendidikan, kesehatan merupakan penyangga yang sangat berguna bagi perkembangan sumberdaya manusia. Berdasarkan data tingkat kesehatan di Papua terutama di daerah pedalaman berada di bawah rata-rata standar nasional. Walaupun kualitas pelayanan meningkat, namun petugas kesehatan yang kurang berkualifikasi terutama pada PUSKESMAS. Selain pendidikan dan kesehatan, faktor demografis juga mempengaruhi peningkatan sumberdaya manusia. Papua telah mengalami sejumlah masalah yang sama dengan bagian-bagian lain di Indonesia seperti penyebaran penduduk yang tidak merata dan terjadinya migrasi yang besar dari daerah pedesaan menuju daerah perkotaan. Sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah itu dan diperkuat lagi dengan adanya transmigrasi dari berbagai provinsi lain. Persentase pertumbuhan penduduk relatif tinggi di desa kota, disusul oleh desa di pesisir dekat kota, dan akhirnya persentase terendah terdapat pada desa pedalaman jauh dari jangkauan kota. Pertumbuhan penduduk bervariasi dalam hubungan dengan letak geografis dan jangkauan transportasi dari pusat perkotaan. Variabel-variabel ini mempengaruhi juga dengan persentase kematian anak balita sebagai kelompok terbesar. Sehingga dapat diuraikan keterkaitan antara persentase kelahiran, umur perkawinan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan.

Permasalahan di atas merupakan hasil dari adanya arogansi kekuasaan politik yang kian mengakar dan merambah dunia birokrasi, adanya kerawanan mentalitas aparatur yang memanfaatkan kewenangannya untuk memihak pada dirinya sendiri. Adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja birokrasi yang melahirkan berbagai bentuk reaksi kekesalan, dari dialog secara damai bahkan aksi demonstrasi.

### **Daftar Pustaka**

- Bisai, C. M., Maria, K., & Dan Achmad, R. P. (2019). Analisa Pembangunan Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4(3), 184-219.
- BPS. (2020). *Provinsi Papua dalam Angka*. BPS, Jayapura.

- Bugin, B. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Second Edition*. Sage Publication, Inc.
- Daryanto, A., & Hafizrianda, Y. (2018). *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. PT Penerbit IPB Press.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of management Review*, 20(1), 65-91.
- Djojosoekarto, A., Qisai, A., Musyadat, A., Iksanto, M. A., Suryaman, C., Sumirat, B. W., Gama, F., Affianto, A., & Tohari, A. (2012). *Nilai-nilai Dsar Orang Papua dalam Mengelola Tata Pemerintahan (Governance)*. Centre for Learning and Advancing Experimental Democracy.
- Ermasari, A., Sukamdi, S., & Tukiran, T. (2009). Dinamika Kemiskinan di Jawa-Madura Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2002-2007. *Majalah Geografi Indonesia*, 23(1), 1-17.
- Fayakun, M., & Joko, P. (2015). Efektivitas pembelajaran fisika menggunakan model kontekstual (ctl) dengan metode predict, observe, explain terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi. *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 11(1), 49-58.
- Gunadi. (2008). *Ketentuan dasar pajak penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Hudson BM (1979). Comparison of Current Planning theories: Counterparts and Contradictions. *J APA*, 45(4).
- Jauch, L. R., Glueck, W. F., Murad, D., & Sitanggang, A. (1999). *Manajemen strategis dan kebijakan perusahaan*.
- Karsiman, K. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Yang Berbasis Kearifan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera Di Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 15(1), 72-77.
- Kartikasari, S.N., Marshall, A. J., & Beehler, B. M. (2012). *Ekologi Papua*. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Conservation International.
- Katharina, R. (2016). Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dalam Konteks Otonomi Khusus. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 6(2).
- Kitzinger, J. (1996). Introducing Focus Groups. *British Medical Journal*, 311, 299– 302.
- Lehoux, P., Blake, P., & Daudelin, G. (2006). Focus Group Research and “The Patient’s View.” *Sosial Science and Medicine*, 63, 2091–2104.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1990). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Prenada Media Group.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. Sage Publication. Muhadjir, N. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.

- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. REFERENSI (GP Press).
- Nazaki, N., Handrisal, S., & Handrisal, S. (2018). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tanjungpinang.
- Raidyarto, A. (2018). Analisa Strategis Kesiapan Papua Menjadi Provinsi Cerdas. *Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI) 2018*.
- Raharjo, W. T., & Harnovinsah. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana
- Suharyo, S. (2016). Otonomi Khusus di Papua dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 323-337.
- Talitha, T. (2017). Rethinking Metropolitan Governance: An Exploration of Urban Entrepreneurialism in Decentralized Indonesia.
- Trianto. (2012). *Model-model pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivisme*. Jakarta: prestasi Pustaka Raya
- Widjojo, M. S., Amiruddin, A. R. E., Pamungkas, C., & Dewi, R. (2008). Papua road map. *Indonesian Institute of Sciences, Jakarta*.